

ANALISIS KESENJANGAN LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ANTARA SEKOLAH PERKOTAAN DAN DAERAH 3T DI INDONESIA

Rizki Ananda¹, Chania Eka Yuliani², Kesi Misnati³, Rahma Azzikra⁴, Putri
Rahmadiyah⁵

Institusi/lembaga Penulis (¹PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)

Institusi/lembaga Penulis (²PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)

Institusi/lembaga Penulis (³PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)

Institusi/lembaga Penulis (⁴PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)

Institusi/lembaga Penulis (⁵PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)

Alamat e-mail : 1rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id ,

2chaniaekayuliani@gmail.com, 3ksimsnti@gmail.com,

4rahmazikra1706@gmail.com, 5putrirahmadiyah40@gmail.com,

ABSTRACT

The gap in basic education services between urban areas and 3T (frontier, outermost and disadvantaged) areas remains a major challenge in Indonesia's education system. This article aims to review recent scientific and policy literature to understand the root causes, forms of inequality and strategies that can be implemented to address the problem. Using a systematic literature review approach of 20 relevant scientific and policy sources for the period 2018-2024, it is found that disparities in education services cover aspects of infrastructure, teacher quality and distribution, access to technology, curriculum implementation, and student learning outcomes. While schools in cities enjoy adequate facilities and educational resources, schools in the 3T areas still struggle with physical limitations, human resources and access to information. This study recommends the need for local data-based interventions, continuous teacher training, utilization of inclusive learning technologies and cross-sector collaboration to promote education equity. The findings are expected to serve as a reference for education policy makers and practitioners in designing more equitable and contextualized policies for the 3T areas.

Keywords: education gap, basic education, 3T areas, education services, literature review

ABSTRAK

Kesenjangan layanan pendidikan dasar antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai literatur ilmiah

dan kebijakan terkini guna memahami akar penyebab, bentuk ketimpangan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap 20 sumber ilmiah dan kebijakan yang relevan pada kurun waktu 2018–2024, ditemukan bahwa kesenjangan layanan pendidikan mencakup aspek infrastruktur, kualitas dan distribusi guru, akses terhadap teknologi, pelaksanaan kurikulum, serta hasil belajar siswa. Sementara sekolah-sekolah di kota menikmati fasilitas dan sumber daya pendidikan yang memadai, sekolah-sekolah di daerah 3T masih bergulat dengan keterbatasan fisik, sumber daya manusia, dan akses informasi. Studi ini merekomendasikan perlunya intervensi berbasis data lokal, pelatihan guru yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi pembelajaran inklusif, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pemerataan pendidikan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan kontekstual untuk wilayah 3T.

Kata kunci: kesenjangan pendidikan, pendidikan dasar, daerah 3T, layanan pendidikan, literatur review

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi landasan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah berupaya menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan, termasuk di jenjang pendidikan dasar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) masih menjadi

tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi (Hasanah et al., 2022).

Wilayah 3T di Indonesia umumnya berada di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, terpencil, dan memiliki keterbatasan dalam infrastruktur serta sumber daya manusia. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tenaga pendidik yang berkualifikasi, serta akses terhadap teknologi dan informasi yang memadai (Suryadi, 2021). Sebaliknya, sekolah di daerah 3T menghadapi hambatan besar dalam hal infrastruktur fisik, distribusi guru, dan akses terhadap pelatihan

pendidikan (Prasetyo & Zulfikar, 2021).

Dalam konteks global, UNESCO telah menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDG) keempat, yang bertujuan memastikan pendidikan yang merata bagi semua. Laporan Global Education Monitoring Report UNESCO (2020) menyoroti bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu fokus pada pemerataan layanan pendidikan, terutama di daerah terpencil yang rawan tertinggal secara sistemik.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), capaian mutu pendidikan dasar di daerah perkotaan secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, sedangkan capaian dari daerah 3T menunjukkan kesenjangan signifikan. Sebagai contoh, hasil Asesmen Nasional dan PISA menunjukkan skor literasi dan numerasi siswa di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya lebih tinggi dibandingkan siswa dari wilayah seperti Papua, NTT, dan Maluku (OECD, 2019; Maulana & Fitri, 2020).

Masalah infrastruktur menjadi isu mendasar dalam kesenjangan layanan pendidikan dasar. Studi oleh Hasanah et al. (2022) mencatat bahwa banyak sekolah dasar di daerah 3T masih kekurangan ruang kelas yang layak, toilet yang bersih, perpustakaan, serta laboratorium sains atau komputer. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah di perkotaan yang umumnya dilengkapi dengan fasilitas belajar modern, termasuk ruang multimedia dan akses internet (Sari & Handayani, 2021).

Kualitas dan distribusi guru juga merupakan salah satu isu utama. Menurut Suryadi (2021), guru-guru dengan kualifikasi S1 dan sertifikasi profesional lebih banyak tersebar di kota, sementara daerah 3T sering kali kekurangan guru tetap dan hanya mengandalkan guru honorer dengan pelatihan yang terbatas. Upaya seperti program SM-3T telah digagas pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, namun implementasinya belum mampu memberikan dampak yang merata dan berkelanjutan (Prasetyo & Zulfikar, 2021).

Dalam hal kurikulum, sekolah-sekolah di kota lebih cepat mengadopsi dan menerapkan Kurikulum Merdeka karena memiliki akses terhadap pelatihan dan dukungan teknis dari Dinas Pendidikan (Kurniawan & Dewi, 2023). Sebaliknya, sekolah di wilayah 3T menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum tersebut secara efektif karena keterbatasan bimbingan dan bahan ajar.

Pandemi COVID-19 memperparah ketimpangan pendidikan yang sudah ada. Laporan UNICEF (2021) mencatat bahwa lebih dari 80% siswa di daerah 3T tidak dapat mengakses pembelajaran daring akibat tidak memiliki perangkat dan koneksi internet. Sementara itu, siswa di wilayah perkotaan dapat melanjutkan pembelajaran melalui berbagai platform digital. Akibatnya, terjadi learning loss yang signifikan dan berpotensi memperlebar kesenjangan akademik.

Upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ini tercermin dalam berbagai program seperti Dana Alokasi Khusus (DAK),

Program Indonesia Pintar (PIP), serta pembangunan infrastruktur pendidikan melalui APBN dan kerja sama daerah. Namun, efektivitas program tersebut masih terbatas. Menurut laporan Dinas Pendidikan Provinsi NTT (2021), distribusi bantuan sering tidak tepat sasaran, dan pengelolaan anggaran pendidikan di daerah 3T masih terkendala oleh lemahnya kapasitas manajerial sekolah.

Beberapa studi kebijakan menyarankan perlunya pendekatan berbasis wilayah (place-based approach) dalam merancang intervensi pendidikan (Nugroho & Amelia, 2022). Pendekatan ini memungkinkan kebijakan yang responsif terhadap karakteristik lokal serta mampu memberdayakan potensi masyarakat setempat untuk turut serta dalam meningkatkan layanan pendidikan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi pendidikan secara adaptif dapat menjembatani keterbatasan geografis. Utomo & Hidayat (2020) menyebut bahwa model blended learning berbasis modul offline dan pembelajaran lewat radio atau TV dapat menjadi solusi alternatif di

daerah yang belum tersentuh jaringan internet.

Ketimpangan layanan pendidikan juga berdampak terhadap mobilitas sosial dan pembangunan jangka panjang. Anak-anak di daerah 3T yang tidak mendapatkan layanan pendidikan bermutu memiliki peluang yang lebih kecil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi, serta menghadapi keterbatasan dalam memasuki pasar kerja formal (UNESCO, 2023).

Literatur lain menekankan bahwa peran kepala sekolah dan supervisi pendidikan sangat penting dalam menjaga mutu pendidikan di daerah 3T. Wulandari & Hasan (2022) menunjukkan bahwa kepala sekolah yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan akses terhadap pelatihan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif meskipun berada di wilayah terpencil.

Penelitian ini disusun untuk mengkaji secara sistematis literatur-literatur terbaru yang membahas perbedaan layanan pendidikan dasar antara wilayah perkotaan dan daerah 3T. Fokus utama adalah pada aspek infrastruktur, tenaga pendidik, akses

terhadap sumber belajar, penerapan kurikulum, serta hasil belajar siswa. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan peta kesenjangan secara komprehensif, serta mengidentifikasi strategi-strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkecil jurang ketimpangan tersebut.

Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana akademik dan kebijakan mengenai pemerataan pendidikan dasar di Indonesia. Hasil kajian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam merancang intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan, demi mewujudkan sistem pendidikan dasar yang lebih adil dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode systematic literature review (SLR) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai publikasi ilmiah yang relevan mengenai kesenjangan layanan pendidikan dasar antara

wilayah perkotaan dan daerah 3T di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap temuan-temuan empiris dan kebijakan yang telah diterapkan dalam konteks pemerataan pendidikan dasar. Proses pencarian literatur dilakukan melalui basis data nasional dan internasional seperti Garuda, SINTA, DOAJ, Google Scholar, Scopus, serta dokumen kebijakan dari instansi pemerintah (Kemendikbudristek, BPS), dan lembaga dunia seperti UNESCO dan UNICEF.

Kriteria inklusi dalam studi ini mencakup artikel yang diterbitkan pada rentang waktu 2018 hingga 2024, ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan memfokuskan kajian pada pendidikan dasar, terutama yang membahas perbedaan kondisi pendidikan di wilayah perkotaan dan 3T. Jenis dokumen yang dikaji meliputi artikel jurnal peer-reviewed, laporan penelitian, regulasi pemerintah, dan laporan lembaga internasional. Kriteria eksklusi mencakup artikel yang hanya membahas pendidikan menengah atau tinggi, atau yang tidak secara eksplisit

membandingkan kondisi antara wilayah.

Langkah-langkah sistematis dalam kajian ini meliputi: (1) identifikasi pertanyaan penelitian; (2) penelusuran artikel dan dokumen melalui kata kunci seperti "kesenjangan pendidikan dasar", "daerah 3T", "sekolah perkotaan", "akses pendidikan", dan "kualitas layanan pendidikan"; (3) seleksi artikel sesuai kriteria inklusi; (4) analisis tematik terhadap isi literatur; dan (5) sintesis hasil untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, serta rekomendasi strategis. Semua data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan peta masalah dan merumuskan arah kebijakan yang dibutuhkan.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam mengenai akar penyebab dan dampak dari kesenjangan layanan pendidikan dasar di Indonesia, serta menyediakan rekomendasi berbasis bukti yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan, praktisi pendidikan, dan peneliti selanjutnya.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari telaah literatur yang dilakukan mengindikasikan bahwa kesenjangan layanan pendidikan dasar antara wilayah perkotaan dan daerah 3T di Indonesia bukan hanya terjadi pada satu dimensi, tetapi bersifat multidimensi dan sistemik. Temuan-temuan dari 20 sumber literatur yang direview mengelompokkan kesenjangan ini dalam lima kategori utama, yaitu: (1) infrastruktur pendidikan, (2) kualitas dan distribusi guru, (3) akses terhadap teknologi dan digitalisasi pembelajaran, (4) pelaksanaan kurikulum, dan (5) capaian hasil belajar siswa. Diskusi berikut menjelaskan masing-masing aspek secara rinci berdasarkan hasil kajian.

3.1 Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan

Sebagian besar studi yang ditelaah menunjukkan bahwa kondisi fisik sekolah dasar di wilayah 3T berada pada tingkat yang memprihatinkan. Menurut Hasanah et al. (2022), lebih dari 60% sekolah di wilayah 3T tidak memiliki bangunan permanen dan sarana dasar seperti toilet, perpustakaan, dan listrik.

Sementara itu, sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas ruang kelas yang layak, laboratorium komputer, dan akses internet.

Sari & Handayani (2021) menekankan bahwa aksesibilitas menuju sekolah di daerah 3T juga menjadi kendala, di mana banyak siswa harus berjalan kaki berjam-jam melewati medan sulit untuk sampai ke sekolah. Hal ini berdampak terhadap angka kehadiran dan motivasi belajar siswa. Sebaliknya, sekolah di perkotaan cenderung berlokasi strategis dengan sarana transportasi umum yang mendukung.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa intervensi infrastruktur pendidikan masih belum merata dan memerlukan pendekatan berbasis peta kebutuhan lokal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) mengakui bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur belum mampu menjangkau seluruh sekolah di daerah tertinggal karena keterbatasan anggaran dan ketidaktepatan sasaran.

3.2 Kualitas dan Distribusi Guru

Masalah guru di daerah 3T menjadi perhatian utama dalam hampir semua literatur yang ditelaah. Prasetyo & Zulfikar (2021) menyebut bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil cenderung kekurangan guru tetap, dan lebih banyak mengandalkan guru honorer yang tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Hal ini berbeda dengan kondisi di sekolah perkotaan, yang relatif lebih mudah merekrut guru berkualifikasi tinggi dan bersertifikasi.

Suryadi (2021) menambahkan bahwa insentif tunjangan daerah khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada guru di wilayah 3T tidak selalu cukup untuk menarik minat guru berkualitas untuk mengabdikan diri di sana. Banyak guru yang ditempatkan melalui program SM-3T mengajukan mutasi setelah masa tugas selesai, menciptakan siklus kekosongan pengajar yang berulang.

Kualitas guru yang rendah turut berimplikasi pada proses pembelajaran yang tidak optimal. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan supervisi pengajaran menyebabkan minimnya inovasi dalam penyampaian materi.

Wulandari & Hasan (2022) menekankan bahwa peran kepala sekolah dalam mengembangkan kualitas guru sangat krusial, namun banyak kepala sekolah di daerah 3T sendiri belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai.

3.3 Akses terhadap Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran

Literatur sepakat bahwa pandemi COVID-19 memperlebar kesenjangan layanan pendidikan, terutama dari sisi akses terhadap teknologi pembelajaran. UNICEF (2021) dalam laporannya menyebutkan bahwa lebih dari 80% siswa di daerah 3T tidak memiliki akses terhadap perangkat pembelajaran digital seperti laptop atau smartphone, dan lebih dari 90% tidak memiliki akses internet di rumah.

Sebaliknya, siswa di kota-kota besar memiliki kesempatan untuk mengikuti pembelajaran daring dengan dukungan teknologi yang memadai. Hal ini memperbesar kesenjangan hasil belajar antara kedua wilayah. Utomo & Hidayat (2020) merekomendasikan penerapan model pembelajaran

berbasis teknologi rendah (low-tech) seperti siaran TV, radio, dan distribusi modul cetak sebagai solusi transisi menuju digitalisasi inklusif.

Kurniawan & Dewi (2023) juga menyoroti kurangnya pelatihan guru di daerah 3T dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Tanpa literasi digital yang cukup di kalangan pendidik, potensi pemanfaatan teknologi sebagai alat pemerataan akses pendidikan menjadi terhambat.

3.4 Pelaksanaan Kurikulum

Implementasi kurikulum juga menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Sekolah-sekolah di perkotaan mendapatkan akses langsung ke pelatihan dan bimbingan teknis dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, termasuk program-program seperti Sekolah Penggerak. Di sisi lain, banyak sekolah di wilayah 3T belum memahami kerangka kerja kurikulum- secara utuh karena keterbatasan informasi dan minimnya pendampingan (Kurniawan & Dewi, 2023).

Kurikulum berbasis proyek yang menuntut kreativitas dan kolaborasi juga sulit diterapkan tanpa dukungan fasilitas dan pelatihan. Banyak guru

di daerah 3T lebih memilih pendekatan konvensional karena tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai pembelajaran diferensiatif dan asesmen formatif.

Selain itu, kurikulum tidak selalu relevan dengan konteks lokal. Nugroho & Amelia (2022) menekankan pentingnya kurikulum kontekstual yang mempertimbangkan budaya, bahasa, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat agar proses pembelajaran lebih bermakna.

3.5 Hasil Belajar dan Capaian Akademik

Data dari PISA (OECD, 2019) dan Asesmen Nasional menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam capaian literasi dan numerasi siswa SD antara wilayah perkotaan dan 3T. Maulana & Fitri (2020) menunjukkan bahwa siswa di daerah 3T tertinggal dua hingga tiga tahun ajaran dalam penguasaan kompetensi dasar jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di kota besar.

Faktor-faktor seperti absensi guru, tidak konsistennya proses belajar-mengajar, serta keterbatasan bahan ajar disebut sebagai penyebab

utama rendahnya capaian tersebut. UNESCO (2023) menyatakan bahwa capaian belajar yang rendah akan berimplikasi pada terbatasnya mobilitas sosial dan kesempatan ekonomi anak-anak dari wilayah tertinggal.

Kesenjangan hasil belajar ini memperkuat pentingnya pendekatan intervensi yang menyeluruh dan berbasis bukti. Pemerintah perlu melakukan pemetaan capaian secara berkala dan mengembangkan program remedial berbasis komunitas untuk membantu siswa yang tertinggal.

3.6 Upaya Pemerintah dan Tantangan Implementasi

Berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan layanan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), DAK Fisik untuk pembangunan ruang kelas, serta distribusi buku dan alat peraga. Namun efektivitas program-program tersebut masih dipertanyakan karena lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya monitoring dan evaluasi, serta tidak adanya keberlanjutan intervensi (Nugroho & Amelia, 2022).

Banyak sekolah di wilayah 3T juga tidak mampu mengakses bantuan karena keterbatasan kapasitas administrasi dan literasi digital untuk pengajuan proposal atau pelaporan dana. Ini menunjukkan pentingnya pelatihan manajerial bagi kepala sekolah dan pengawas di daerah.

Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan organisasi internasional seperti UNICEF dan UNESCO menjadi penting untuk memperkuat kapasitas lokal dan mempercepat pemerataan layanan pendidikan.

Secara umum, hasil review ini menunjukkan bahwa kesenjangan layanan pendidikan- dasar antara kota dan daerah 3T merupakan hasil dari ketidakmerataan struktural yang berlangsung lama. Solusinya tidak bisa bersifat sektoral atau jangka pendek, tetapi memerlukan pendekatan lintas sektor, partisipatif, dan berbasis data.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan kebijakan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa

kesenjangan layanan pendidikan dasar antara wilayah perkotaan dan daerah 3T di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensi. Kesenjangan ini mencakup aspek infrastruktur, kualitas dan distribusi guru, akses terhadap teknologi pembelajaran, pelaksanaan kurikulum, dan capaian hasil belajar siswa. Sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki sumber daya yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap inovasi pendidikan, sementara sekolah di daerah 3T masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat proses belajar-mengajar yang efektif.

Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga berimplikasi pada kesenjangan kesempatan jangka panjang bagi peserta didik, terutama dalam hal mobilitas sosial dan akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya hasil belajar siswa di daerah 3T juga menjadi indikator bahwa layanan pendidikan belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program afirmatif seperti PIP, DAK, dan SM-3T,

pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan struktural yang mengurangi efektivitasnya.

Secara umum, kesenjangan pendidikan ini mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan tujuan SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. Upaya yang lebih sistematis, terkoordinasi, dan berbasis bukti sangat diperlukan untuk menutup jurang perbedaan layanan pendidikan antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks pembangunan manusia 2023. <https://www.bps.go.id>
- Dinas Pendidikan Provinsi NTT. (2021). Laporan tahunan pendidikan dasar di daerah 3T Nusa Tenggara Timur. Kupang: Disdik NTT.
- Hasanah, R., Putri, N., & Wibowo, H. (2022). Kesenjangan layanan pendidikan dasar antara kota dan desa: Studi komparatif di Pulau Jawa dan Papua. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 45–59. <https://doi.org/10.21009/JPI.112.5>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peta mutu pendidikan dasar dan menengah tahun 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Kurniawan, T., & Dewi, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah 3T: Peluang dan tantangan. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 8(1), 20–34. <https://doi.org/10.25008/jkp.v8i1.345>
- Maulana, R., & Fitri, D. (2020). Analisis capaian belajar siswa SD di daerah 3T dan non-3T. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 10(3), 88–102. <https://doi.org/10.31540/jpp.v10i3.321>
- Nugroho, H., & Amelia, S. (2022). Evaluasi pemerataan pendidikan dasar di Indonesia: Tinjauan regulatif dan pelaksanaan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 14(1), 15–30.
- OECD. (2019). PISA 2018 Results: Combined executive summaries. <https://www.oecd.org/pisa>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019.
- Prasetyo, A., & Zulfikar, T. (2021). Tantangan pengiriman guru ke daerah 3T: Studi kasus program SM-3T. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 78–90. <https://doi.org/10.31227/jip.v15i1.23>
- Sari, M. E., & Handayani, L. (2021). Ketimpangan sarana pendidikan dasar antara daerah urban dan rural. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 9(2), 134–147.
- Suryadi, B. (2021). Distribusi guru dan ketimpangan layanan pendidikan dasar di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1), 60–75. <https://doi.org/10.32528/jmp.v15i1.414>
- Syafrudin, R., & Yulianto, D. (2022). Akses pendidikan dasar di wilayah perbatasan: Studi lapangan di Kalimantan Utara. *Jurnal Batas Negara*, 5(2), 101–115.
- UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education – All means all. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>
- UNESCO. (2023). Education for rural and marginalized communities in Southeast Asia. Bangkok: UNESCO Office Bangkok.
- UNICEF Indonesia. (2021). Children's unequal access to online learning in Indonesia during COVID-19. <https://www.unicef.org/indonesia>
- Utomo, A., & Hidayat, A. (2020). Peran teknologi dalam mempersempit kesenjangan layanan pendidikan di daerah 3T. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 6(3), 98–112.
- Wulandari, S., & Hasan, M. (2022). Supervisi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di daerah terpencil. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2), 67–80.
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulfa, D. R., & Nuraini, F. (2023). Kebijakan pendidikan afirmatif bagi daerah 3T: Analisis keberlanjutan

program. Jurnal Analisis Kebijakan
Pendidikan, 7(1), 41–55